
Subsidi di Indonesia

Anugrah Stephen Soen*, Herry Sugianto*, Ricky Theodorus dan Supeni Anggraeni Mapusari
Universitas Presiden, Cikarang – Indonesia

anugrah.soen@student.president.ac.id*, herry.sugianto@student.president.ac.id*,
ricky.theodorus@student.president.ac.id dan supeni@president.ac.id

How to cite (in APA style):

Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21 (1), pp.84-92. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>

Abstract

Subsidies are one of the tools for equitable distribution of welfare that the state can use to help low-income communities. The existence of subsidies allows the government to maintain economic stability and public welfare. One of the challenges in allocating subsidies in Indonesia, among others, is the vast territory of the country with a variety of diversity, so that the strategy adopted will also be unique. Therefore, the distribution mechanism also varies in terms of form, size, and procedure. This study discusses various kinds of subsidies that the government has provided. Various types and mechanisms of subsidies are discussed to facilitate subsidy mapping. In addition, this study also describes the subsidies carried out by the government during the pandemic. This detailed discussion of subsidies is expected to enrich the literature on subsidies based on practices that have been carried out in Indonesia. Many considerations need to be made by the government so that the budget provided for subsidies can meet the subsidy target by taking into account the financial capacity of the state. Subsidies in the APPBN Indonesia are also growing from year to year. The analysis in this article indicates that what the government has done from 2015 to 2019 has succeeded in building better human resources and providing good facilities to make Indonesia a decent place to live.

Keywords: *subsidy; economy; APBN; pandemic; indonesia.*

Abstrak

Subsidi merupakan salah satu alat pemerataan kesejahteraan yang dapat negara manfaatkan untuk membantu masyarakat ekonomi bawah. Keberadaan subsidi memungkinkan pemerintah menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan pengalokasian subsidi di Indonesia antara lain adalah wilayah negara yang luas dengan berbagai keberagaman, sehingga strategi yang dilakukan pun akan menjadi unik. Oleh sebab itu, mekanisme penyalurannya pun bervariasi dalam hal bentuk, besaran, dan tata cara. Penelitian ini membahas berbagai macam subsidi yang pemerintah telah berikan. Berbagai macam dan mekanisme subsidi dibahas untuk memudahkan pemetaan subsidi. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi. Pembahasan yang detil terkait subsidi ini diharapkan memperkaya literatur subsidi berdasarkan praktik yang telah dilakukan di negara Indonesia. Banyak pertimbangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar penganggaran yang diberikan untuk subsidi dapat memenuhi target subsidi dengan memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki oleh negara. Subsidi di APPBN Indonesia juga sangat berkembang dari tahun ketahun analisis di artikel ini menandakan apa yang dilakukan oleh pemerintah semenjak 2015 hingga 2019 berhasil untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik dan memberikan fasilitas yang baik untuk menjadikan indonesia tempat yang layak untuk ditinggali.

Kata kunci: subsidi; ekonomi; APBN; pandemi; indonesia

I. PENDAHULUAN

Subsidi adalah bantuan uang atau komoditas, perkumpulan atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Economics*, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima. Secara Singkatnya, pengertian subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan.

Bentuk subsidi bisa Materi, Uang, Kebutuhan sembako, Barang hingga keringanan biaya. Biasanya, golongan yang menjadi penerima subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Subsidi yang di berikan pemerintah ini bersumber dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh pemerintah kembali lagi ke dalam lingkup masyarakat melalui pemberian subsidi. Subsidi

diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli atau purchasing power (kemampuan masyarakat untuk membeli) adalah kekuatan uang atau jumlah barang yang dapat dibeli oleh seorang individu dengan jumlah uang tertentu

Subsidi diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli atau purchasing power (kemampuan masyarakat untuk membeli) adalah kekuatan uang atau jumlah barang yang dapat dibeli oleh seorang individu dengan jumlah uang tertentu. Contohnya, Pemerintah yang memberikan subsidi kepada masyarakat golongan yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah dengan tujuan agar beban hidup mereka menjadi lebih ringan, misalnya BBM bersubsidi berguna untuk membantu masyarakat agar biaya BBM yang mereka keluarkan lebih rendah sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan BBM misalnya biaya angkut barang menjadi lebih murah.

Dengan begitu semua kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak akan terhambat dikarenakan adanya subsidi. Subsidi pertama kali di laksanakan di Indonesia pada tahun 2005, tepatnya lagi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, lalu berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Saat itu program diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dan tujuan utama dari program tersebut adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah mengalokasikan dana untuk belanja subsidi nonenergi Rp 72,93 triliun pada 2022. Nilai tersebut persentasenya mencapai 35,24% dari total belanja subsidi. Pemerintah memangkas total belanja subsidi 16,73% menjadi Rp 206,96 triliun pada tahun ini dari 2021 (outlook) sebesar Rp 248,56 triliun. Demikian pula subsidi nonenergi tahun ini dipangkas 39,27% dari outlook 2021 sebesar Rp 120,09 triliun. Sementara subsidi energi justru meningkat 4,3% menjadi Rp 134,03 triliun pada tahun ini dari sebelumnya Rp 128,47 triliun.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Subsidi

Subsidi merupakan isu lama, yang memiliki polemik di pro dan kontranya. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah agar penganggaran yang diberikan untuk subsidi dapat memenuhi target subsidi dengan memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki oleh negara. Maka tidak heran, isu dari subsidi mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena seringkali terjadi pergolakan akibat dari perubahan yang menimpa pada subsidi. Contohnya seperti pengurangan subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menimbulkan protes oleh berbagai kalangan di dua puluh tahun terakhir, tetapi ini wajar jika dilihat kembali bagaimana pentingnya BBM dalam menyangkut banyak kehidupan di berbagai kalangan dari yang kecil-menengah hingga mereka yang memiliki ekonomi di atas rata-rata merasakan manfaat subsidi BBM ini.

Bentuk dari Subsidi yaitu Profit Loss dan Cost Loss. Dalam Profit Loss, Subsidi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi perbedaan dalam harga jual atau manfaat yang diberikan oleh produk dengan harga pokok atau biaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan produksi tersebut. Jadi, subsidi dalam bentuk Profit Loss adalah bentuk penyamaan harga jual dan harga pokok untuk menutupi selisih dari untung dan rugi bagi produsen. Sedangkan pada Cost Loss, harga jual tidak berdasarkan pada harga pokok melainkan menggunakan harga pasar dimana selisih antara harga pasar dan harga jual menjadi biaya yang harus ditanggung. (Wardana, 2020)

Bagaimana contoh penerapannya? Sebagai contoh: LPG tabung 3 kg harga normal/ Harga pasar yang dimiliki jika dilihat harga keekonomiannya adalah Rp36.900 atau Rp12.300/Kg dan akan memiliki laba sebesar Rp 15.900, Jika Harga Pokok LPG tabung kg adalah Rp21.000 atau Rp7.000/kg. Selisih inilah antara Rp36.900 dan Rp21.000 yaitu Rp15.900 yang akan menjadi besarnya subsidi yang diberikan untuk menutupi margin keuntungan dari LPG tabung 3 kg, Sebagai wujud untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dalam bentuk komoditas (Umah, 2021).

Dampak Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar

Keseimbangan harga dapat terbentuk karena adanya titik temu antara permintaan dan

penawaran dengan kata lain suatu produk telah mencapai harga keseimbangannya ketika penawaran atas jumlah produknya dan permintaan atas jumlah produknya telah mencapai harga dan waktu di titik tertentu. Sedangkan pada keseimbangan pasar, akan terjadi kesimbangan ketika ada penjual yang menawarkan produknya dan bersamaan dengan pembeli yang menginginkan produk yang sama dan diikuti oleh volume yang sama. (Munawar, 2013)

Jadi yang sangat mempengaruhi akan keseimbangannya harga adalah interaksi antara pembeli dan penjual yang mana sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Dimana permintaan akan mengalami kenaikan ketika terjadi penurunan pada harga dan penawaran akan mengalami kenaikan ketika terjadi kenaikan pada harga. Maka dari itu, penting untuk adanya kesepakatan yang disepakati antara pembeli dan penjual agar transaksi dapat terjadi. Karena ketika penawaran terjadi terlalu tinggi/berlebihan akan dikenal sebagai surplus dan ketika permintaan terjadi terlalu tinggi/berlebihan akan dikenal sebagai shortage. (Putri, et al., 2017)

Kemudian, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi agar tetap menjaga keseimbangan pada pasar: Pertama, Berapa harga dan jumlah produk yang terdapat di pasar untuk memenuhi keseimbangan pada saat sebelum dan sesudah subsidi diberikan? Kedua, Berapa besarnya subsidi yang perlu diberikan oleh pemerintah agar menjadi keseimbangan pada pasar dengan memperhatikan aspek konsumen dan produsennya?

Sebagai ilustrasi, misalnya untuk memenuhi keseimbangan harga pada produk pangan gula, di pasaran satu kilogram gula di pasar dihargai 15.000/kg. Tetapi menjelang tahun baru, sering terjadi kenaikan pada harga gula di pasaran menjadi 20.000/kg yang mana menyebabkan harga keseimbangan menjadi terganggu. Melihat hal tersebut konsumen akan menurunkan daya beli mereka dan produsen akan menjadi terganggu jumlah produksinya. Menanggapi ini, pemerintah dapat campur tangan untuk menjaga keseimbangan harga pasar, salah satu cara bentuk yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan subsidi. Maka setelah subsidi diberikan kepada produsen, harga gula dapat terkendali dan permintaan akan ikut kembali menjadi stabil, yang kemudian dapat menjadikan harga gula setelah subsidi menjadi Rp 14.000,00/kg. Jadi harga barang/jasa setelah disubsidi dapat menjadi lebih murah dan juga jumlah dari barang/jasa permintaan juga dapat meningkat.

Manfaat dan efek buruknya pelaksanaan subsidi

Dampak Positif Subsidi

Dalam memberlakukan subsidi, adapun dampak positif atau manfaat yang diperoleh: Pertama, Meningkatkan kemampuan ekonomi, dengan adanya subsidi objek subsidi dapat mengalami penurunan dalam harga dibawah atau setara dengan harga keseimbangannya yang mana akan menjaga daya beli masyarakat. Kedua, Jika subsidi ditujukan untuk masyarakat yang berekonomi bawah atau tidak mampu, tentunya akan membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonominya dengan harapan ekonomi mereka akan secara bertahap membaik. Ketiga, Di sisi pelaku usaha, subsidi dapat mencegah kebangkrutan usaha mereka karena subsidi harus tetap memandang keseimbangan pasar dan meningkatkan kualitas ekonominya di atas daya saing dari produk usaha dari luar negeri.

Dampak Negatif Subsidi

Sedangkan dampak negatif dari adanya subsidi ialah: Pertama, Adanya kecenderungan ketika konsumen dapat membayar atas produk yang disubsidi dibawah harga pasarnya, mereka akan melakukan pengeluaran berlebihan ketimbang berhemat akan kenikmatan yang diterimanya. Jika ini tidak diregulasi, subsidi akan menyebabkan ketidak efisienan dalam distribusinya. Kedua, Penyimpangan harga, subsidi dapat menimbulkan penyimpangan harga karena subsidi hanya bertujuan untuk program populis saja tanpa melihat efisiensinya, target subsidi atau orang yang berhak mendapatkan subsidi berpotensi tidak dapat menikmatinya. Ketiga, Mengganggu jalannya mekanisme pasar, dikarenakan subsidi memerlukan biaya ekonomi yang sangat besar dan juga melumpuhkan pasar persaingan yang akan merugikan pihak swasta (Ibnu, 2021)

Subsidi di APBN Indonesia

Dalam perencanaan dan pendistribusian subsidi di indonesia disusun di rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana sesuai dengan jenisnya, subsidi termasuk kedalam anggaran

belanja pemerintah pusat. subsidi merupakan penerapan dari fungsi apbn yaitu fungsi Alokasi untuk meningkatkan efisiensi, tumbuhnya, dan berkembangnya perekonomian dan menjadi fungsi stabilisasi untuk menyeimbangkan makro ekonomi di negara, tetapi apakah fungsi dan tujuan subsidi itu sudah terwujud dan apakah sudah diterima dengan baik oleh target serta apakah sudah ada dampak baik yang dirasakan oleh subsidi itu haruslah dikaji oleh penyelenggara melalui data-data terkait, indeks kemakmuran masyarakat dan indeks ekonomi negara itu sendiri. Sebagai perbandingan berikut adalah kebijakan APBN 2015 hingga 2019 dalam aturan subsidi. ([Wikipedia, 2006](#))

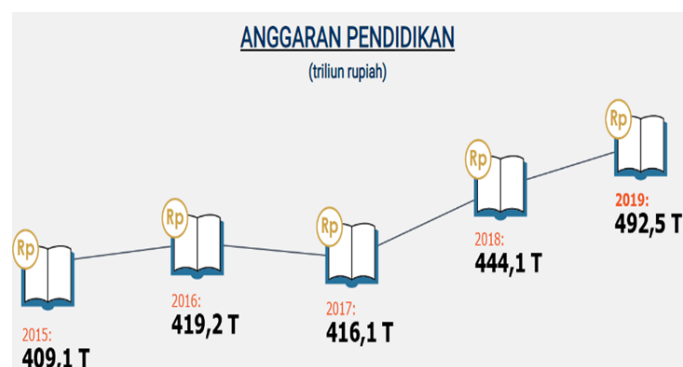
Arah kebijakan subsidi sesuai dengan APBN tahun 2015 ialah untuk, mempertahankan stabilitas harga pokok pangan, menjaga daya beli masyarakat miskin, menjaga pasokan kebutuhan pangan, dan meningkatkan daya saing produksi dan permodalan para UMKM menjadi lebih meningkat. Oleh karena itu 83% subsidi dialokasikan ke subsidi energi dan 17% sisanya dialokasikan ke subsidi non energi. subsidi energi tersebut mencakup subsidi bahan bakar minyak dan subsidi listrik dan subsidi non energi mencakup subsidi di pangan, pupuk, public service obligation, bunga kredit dan pajak ([Indonesia, APBN 2015, 2015](#))

Berlanjut di tahun 2016, pemerintah ingin lebih fokus dalam penggaaran dan pengalokasian subsidinya untuk tepat sasaran. Misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berekonomi kurang melalui bantuan sosial kepada enam juta keluarga swadaya masyarakat. Terdapat juga bantuan berupa kebutuhan pokok melalui program Sejuta Rumah yang berbentuk dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah. ([Indonesia, APBN 2016, 2016](#))

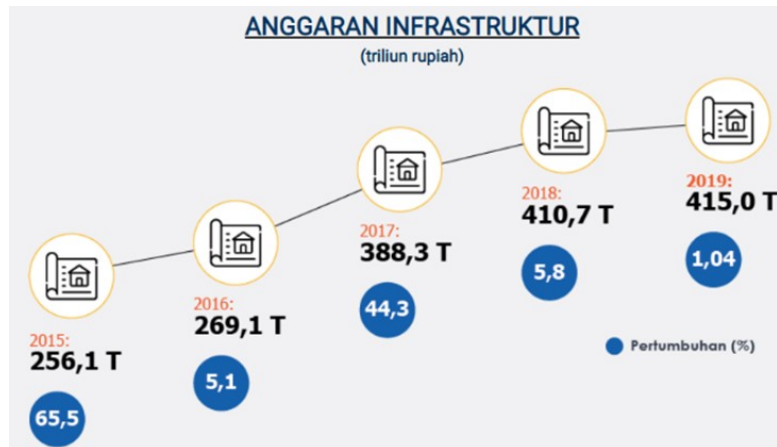
Di tahun 2017, tetap dengan agenda yang sama yaitu menyalurkan subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan program perlindungan sosial yang dimilikinya, dengan memprioritaskan programnya di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi. Tidak luput, pemerintah lebih fokus ke desa dengan cara melaksanakan transfer ke daerah dan desa guna pemerataan pembangunan daerah dan desa. ([Indonesia, APBN 2017, 2017](#))

Untuk tahun 2018, pemerintah melalui belanja non kementerian/lembaga di APBN mengatur subsidi dalam bentuk energi dan nonenergi. Dalam subsidi energi, pemerintah ingin efisiensi dan tepat sasaran dalam penyaluran subsidinya, Maka dari itu subsidi energi diarahkan ke masyarakat miskin, dan sebagai bentuk cara untuk mengendalikan inflasi. Pada subsidi non energi, pemerintah ingin adanya integrasi dalam semua bentuk subsidi non energi dengan melalui bantuan sosial (bansos) dan transfer dan ke daerah sebagai cara untuk mengatur kebutuhan pokok dan meningkatnya kualitas dari pangan. ([Indonesia, APBN 2018, 2018](#))

Di tahun 2019, Pemerintah dalam merancang APBN mengusung tema “Adil, Sehat, dan Mandiri”. Adapun Adil memiliki arti bahwa APBN akan dipergunakan untuk keadilan, seperti menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru dan menjaga hubungan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Dan penerapan tema ini terbukti dengan adanya anggaran pendidikan yang mencapai Rp 492,5 T yang mengambil 20% bagian dari belanja APBN, anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 415 T, dan transfer ke daerah mencapai alokasi sebanyak Rp 826,8 T dan sebanyak Rp 70 T dari alokasi tersebut dialokasikan ke desa. ([Indonesia, APBN 2019, 2019](#))



Gambar 1
Anggaran Pendidikan



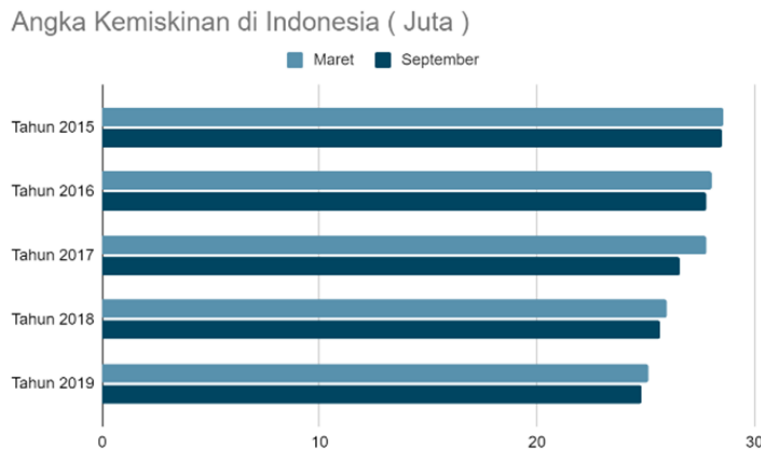
Gambar 2

Anggaran Infrastruktur

Melihat berbagai kebijakan subsidi di APBN dapat terlihat bahwa dalam pembentukannya, APBN sejatinya ingin menjadi bentuk perwujudan yang diinginkan oleh rakyat atau pro-rakyat. Dari Presiden hingga DPR merancang anggaran terbaik yang memadai agar adanya pembangunan dan terjadi kesejahteraan di masyarakat. Walaupun pada penggunaan dana subsidi di APBN masih belum sempurna tetapi terlihat adanya kemajuan di berbagai sektor seperti di pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. (Indonesia, Data APBN, 2022)

Tabel 1

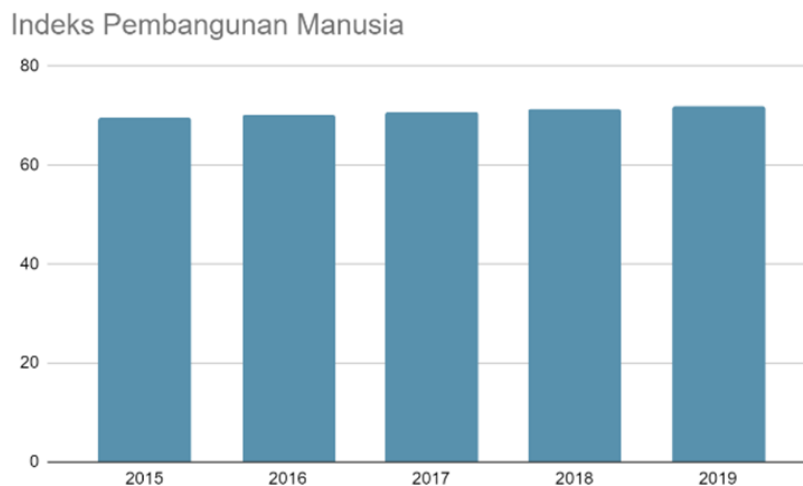
Angka Kemiskinan di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2019



(Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2020, Tempo Co)

Angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan secara persentase. terdata di September tahun 2015, angka kemiskinan mencapai 28,51 juta penduduk miskin dengan, sedangkan di September tahun 2019, angka kemiskinan mengalami penurunan hingga mencapai 24,79 juta orang. (Christy, 2020) Melihat data tersebut dapat terlihat secara tidak langsung subsidi yang dianggarkan pemerintah dapat berhasil memenuhi tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat dan memenuhi banyak hajat hidup orang.

Tabel 2
Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2019



(Sumber: Apa Itu Program Jaring Pengaman Sosial JPS Kemnaker?, Room me)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang dapat mengukur hasil pembangunan kualitas hidup manusia, dengan memberi nilai terhadap pembangunan suatu regional dan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah. Data IPM diambil dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak masyarakat. Diagram diatas adalah Indeks Pembangunan Manusia milik Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019, yang dapat dilihat terdapat kenaikan angka indeks dari tahun 2015 di angka 69,55 dan di tahun 2019 naik hingga mencapai angka 71.98. Apabila angka IPM sudah mencapai di level 70 berarti Indonesia masuk kategori tinggi di IPMnya. Menggambarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah semenjak 2015 hingga 2019 berhasil untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik dan memberikan fasilitas yang baik untuk menjadikan Indonesia tempat yang layak untuk ditinggali. ([Administrator, 2019](#))

Anggaran Subsidi pemerintah Indonesia di masa pandemic

Pandemi covid-19 telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini dimana hal tersebut memberikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satunya berdampak ke anggaran subsidi pemerintahan, dimana pemerintah harus memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat untuk melindungi, mempertahankan ([Amri & Ainul, 2021](#)) agar kebutuhan kehidupan masyarakat menjadi sejahtera walau di masa pandemi dan dapat memberikan pemulihan ekonomi di Indonesia. Sehingga mengakibatkan adanya perubahan dalam sistem pendanaan anggaran subsidi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan subsidi dengan harapan dapat mendukung UMKM dan Koperasi selama pandemi. Dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi anggaran subsidi mengalami perubahan dimana di tahun 2020 biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak Rp. 192 triliun yang terbagi atas Rp. 96,4 Triliun untuk Subsidi energi dan Rp. 95,6 Triliun untuk subsidi nonenergi dengan tingkat pertumbuhan -4,8% yang menandakan penurunan anggaran pendanaan terhadap biaya subsidi ([Indonesia, APBN 2020, 2020](#)) sedangkan di tahun 2021 biaya yang dikeluarkan pemerintah sebanyak Rp. 175,4 Triliun dimana Rp. 64,8 Triliun alokasi subsidi energi dan Rp. 110,5 subsidi nonenergi dengan tingkat pertumbuhan -8,7%. ([Indonesia, Informasi APBN 2021, 2021](#))

Daftar bantuan pemerintah selama pandemi covid-19 berupa: Program Keluarga Harapan (PKH), program ini diberikan kepada 10 juta keluarga dengan total anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp. 28,31 Triliun. Program Kartu Sembako, program ini diteruntukan kepada 18,8 juta keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48,89 Triliun Rp. 200 ribu per keluarga selama 14 bulan. Pemerintah juga memberikan bantuan beras melalui Program Bantuan Beras Bulog dengan anggaran Rp. 3,58 triliun atas beras sebanyak 10 kilogram per keluarga. Program bantuan sosial tunai berupa bantuan dana sebesar Rp. 300 ribu dan beras 10 kilogram ditunjukkan kepada 10 juta keluarga dengan total anggaran sebanyak Rp. 17,46 triliun. Bantuan usulan tunai pemerintah daerah, bantuan

ini ditunjukkan bagi 5,9 juta keluarga dengan manfaat akan menerima uang tunai sebanyak Rp. 200 ribu selama 6 bulan dan selama terjadi PPKM darurat makan akan diberi 10 kilogram beras bantuan ini mengeluarkan anggaran sebanyak Rp. 7,08 triliun. Pemerintah juga memberikan subsidi atau diskon listrik dengan tegangan sebesar 450VA dan 900VA ditunjukkan kepada 32,6 juta pelanggan dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 9,49 triliun. Pemberian kartu prakerja dengan anggaran sebesar Rp. 20 triliun untuk 8,4 juta orang, untuk mendapatkan kartu prakerja masyarakat harus mendaftarkan dirinya secara online dan lulus uji. Subsidi kuota internet, pemerintah memberikan subsidi kuota internet atau biasa disebut kuota KEMENBUD kepada dosen, guru, mahasiswa, dan siswa untuk membantu selaman pembelajaran online berlangsung dan sejauh ini bantuan ini telah diberikan kepada 38,1 juta siswa, mahasiswa serta pendidik dengan total anggaran sebesar Rp. 8,85 triliun. Bantuan langsung tunai dana Desa, bantuan ini diberikan dengan harapan dapat membantu peningkatan ekonomi di desa-desa yang terkena dampak pandemi dengan total anggaran sebesar Rp. 28,8 triliun dengan penerima sebesar 8 juta orang. (Barany, Simanjuntak, & Widia, 2020)

Dalam anggaran subsidi dari pemerintah tersebut, terdapat biaya yang dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp110 triliun. Dimana Jaring pengaman sosial ini merupakan program yang ditunjukkan untuk membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja bagi para pekerja yang terkena dampak pandemi ini seperti pekerja yang terkena PHK maupun yang dirumahkan (Indah, 2021). Pemerintah memberitahu bahwa terdapat empat sektor yang paling terkena dampak pandemic ini, yaitu sektor rumah tangga, pekerja informal, UMKM dan korporasi. Dari keempat sektor tersebut paling rawan atas terjadinya PHK. Bantuan JPS ini diberikan dalam bentuk pembekalan pelatihan, pemberdayaan dan berkelanjutan yang didampingi langsung dari Kemnaker (Indah, 2021)

III. SIMPULAN

Pada artikel ini Subsidi diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli atau purchasing power (kemampuan masyarakat untuk membeli) adalah kekuatan uang atau jumlah barang yang dapat dibeli oleh seorang individu dengan jumlah uang tertentu. Banyak pertimbangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar penganggaran yang diberikan untuk subsidi dapat memenuhi target subsidi dengan memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki oleh negara. Contohnya seperti pengurangan subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat menimbulkan demo dan unjuk rasa oleh berbagai kalangan di dua puluh tahun terakhir, tetapi ini wajar jika dilihat kembali bagaimana pentingnya BBM dalam menyangkut banyak kehidupan di berbagai kalangan dari yang kecil-menengah hingga mereka yang memiliki ekonomi diatas rata rata.

Pada keseimbangan pasar, akan terjadi kesimbangan ketika terdapat penjual yang menawarkan produknya dan bersamaan dengan pembeli yang menginginkan produk yang sama dan diikuti oleh volume yang sama. Jika tujuannya dapat dijalankan dengan baik makan dampak positif dari adanya subsidi ini akan lebih banyak ketimbang dampak negatif nya itu sendiri salah satu dampak positifnya adalah dappat meningkatkan kemampuan ekonomi, dengan adanya subsidi ini dappat mengalami penurunan dalam harga dibawah atau setara dengan harga keseimbangannya yang dimana itu dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat tersebut.

Subsidi di APPBN Indonesia juga sangat berkembang dari tahun ketahun analisis di artikel ini menandakan apa yang dilakukan oleh pemerintah semenjak 2015 hingga 2019 berhasil untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik dan memberikan fasilitas yang baik untuk menjadikan indonesia tempat yang layak untuk ditinggali.

Dan anggaran subsidi pemerintah indonesia dimasa pandemic ini terlihat memberikan dampak negatif bagi peprtumbuhan ekonomi. Salah satunya berdampak ke anggaran subsidi pemerintahan, Dimana pemerintah harus memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat unutup melindungi, mempertahankan (Amri & Ainul, 2021) agar kebutuhan kehidupan masyarakat menjadi sejahtera walau di masa pandemi dan dapat memberikan pemulihan perekonomian di indonesia.

Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan subsidi dengan harapan dapat mendukung UMKM selama pandemi ini, sudah 2 tahun berlalu sejak pandemi dimulai total biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk anggaran subsidi adalah Rp. 367,4 Triliun yang dimana terbagi atas

subsidi energi dan non energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2019, Mei 20). *Indeks Pembangunan Manusia Terus Meningkat*. Diambil kembali dari Indonesia.Go.Id: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/indeks-pembangunan-manusia-terus-meningkat>
- Amri, L. H., & Ainul, W. A. (2021). Ekplorasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tenaga Kependidikan Non PNS Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 1 - 8.
- Atap, & Ahmad. (t.thn.). *Pengertian APBN: Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya*. Diambil kembali dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/apbn/>
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., & Widia, D. A. (2020, April 15). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran? *CSIS Commentaries*, 1-11.
- Christy, F. E. (2020, July 21). *Profil Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2020*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://data.tempo.co/data/817/profil-kemiskinan-di-indonesia-per-maret-2020#:~:text=Pada%20Maret%202015%2C%20jumlah%20penduduk%20miskin%20mencapai%2028%2C59,kembali%20meningkat%20sejak%20pandemi%20Covid-19%2C%20mewabah%20di%20Indonesia>
- Fitriana, N., & Dirhantoro, T. (2021, July 21). *Daftar Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Mulai Dari PKH hingga BLT Dana Desa*. Diambil kembali dari KompasTV: <https://www.kompas.tv/article/194659/daftar-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-mulai-dari-pkh-hingga-blt-dana-desa?page=all>
- Handoko, R., & Patriadi, P. (2005, December). Ealiasi Kebijakan Subsidi Non BBM. *Academia*, 1-22. Diambil kembali dari https://www.academia.edu/3385588/Evaluasi_Kebijakan_Subsidi_Non_BBM
- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. (2021, May). Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1-11. Diambil kembali dari <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/2807/1700>
- Ibnu. (2021, Match 31). *Subsidi Adalah: Pengertian, Jenis dan Dampaknya untuk Perekonomian*. Diambil kembali dari Accurate: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/subsidi-adalah/>
- Idris, M. (2021, July 5). *Apa Itu Subsidi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-contohnya-di-indonesia>
- Indah, A. N. (2021, march 2). *Apa Itu Program Jaring Pengaman Sosial JPS Kemnaker?* Diambil kembali dari RoomMe: <https://roomme.id/artikel/career-&-money/jaring-pengaman-sosial>
- Indonesia, K. K. (2015). *APBN 2015*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2015>
- Indonesia, K. K. (2016). *APBN 2016*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>
- Indonesia, K. K. (2017). *APBN 2017*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Indonesia, K. K. (2018). *APBN 2018*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Indonesia, K. K. (2019). *APBN 2019*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Indonesia, K. K. (2020). *APBN 2020*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/>
-

apbn2020

- Indonesia, K. K. (2021). Informasi APBN 2021. *Kemenkeu*, 1-48. Diambil kembali dari Kemenkeu : <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>
- Indonesia, K. K. (2022). *Data APBN*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>
- Kusnandar, V. B., & Yudhistira, A. W. (2022, January 12). *Berapa Anggaran Subsidi Nonenergi Tahun Ini?* Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/berapa-anggaran-subsidi-nonenergi-tahun-ini>
- Munawar, D. (2013). Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN. *ACADEMIA Accelerating the world's research.*, 1-23.
- Purnama, I. D. (2021, July 18). *Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Hadapi Pandemi Covid-19*. Diambil kembali dari IDXChannel: <https://www.idxchannel.com/economics/10-bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-hadapi-pandemi-covid-19>
- Putri, Y. R., Setyono, G., Nuraini, P. D., M.P.N, B. J., Farendra, N. Z., & Pertiwi, K. B. (2017). Makalah Pengaruh Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar. *Academia*, 1-20.
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 1-13.
- Rivani, E. (2014). Kebijakan Subsidi BBM Dan Efisiensi Perekonomian. *Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1-4.
- Triwiyanto, T. (2020). Bukan Sekedar Subsidi Pulsa, Untuk Mengurangi Angka Putus Sekolah Dampak Pandemi Covid-19. *Public Knowledge Project*, 1-11. Diambil kembali dari <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip/article/view/433>
- Umah, A. (2021). Opini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Perubahan Subsidi di 2022.
- Wardana, R. (2020, October 20). *Pengertian Subsidi Dan Contoh Kebijakan Subsidi Di Indonesia* . Diambil kembali dari Lifepal: <https://lifepal.co.id/media/subsidi/>
- Wikipedia. (2006). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia*. Diambil kembali dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_N